



LKjIP 2020

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

Jl.Rusa No.17 (0485) 21001 Fax. (0485) 21006
www.pemkab.kab.wajo.go.id

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat Rahmat dan Inayah-NYA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Wajo Tahun 2020 telah selesai disusun dan dapat disajikan untuk memberikan gambaran nyata mengenai berbagai kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif ataupun bisa diukur dari sisi efektivitas, dan efisiensi serta ekonomisnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang didalamnya berisi mengenai capaian atas perjanjian kinerja pemerintah daerah yang dicapai selama periode satu tahun anggaran yang merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

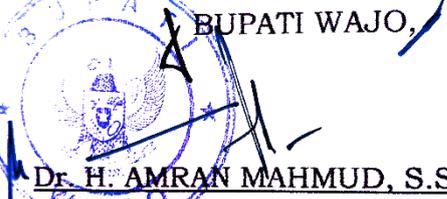
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan selain dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo juga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan perencanaan di masa yang akan datang serta dapat dijadikan ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai Sasaran strategis yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024.

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan hasil kerja semua pihak yang turut serta memberikan

bimbingan dan masukan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Wajo Tahun 2020 Tahun Anggaran 2021 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggung jawaban kinerja serta bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo.

Sengkang, 12 Maret 2021

 **BUPATI WAJO,**

Dr. H. AMRAN MAHMUD, S.Sos., M.Si.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2020 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran kinerja utama yang diarahkan untuk dapat mencapai misi dan visi Pemerintah Kabupaten Wajo sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Wajo dan diformulasikan dalam bentuk Perjanjian Kinerja Bupati Wajo Tahun 2020.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, transparansi dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan *clean government* dan *good governance*, maka Akuntabilitas Instansi Pemerintah disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian, LKjIP Kabupaten Wajo Tahun 2020 ini disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran-sasaran yang ditargetkan dapat dicapai pada Tahun 2019-2024 sebagai bagian dari upaya pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Wajo “Pemerintah Amanah, Menuju Wajo yang Maju dan Sejahtera”

Sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, LKjIP tidak hanya menyajikan informasi yang berisi tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2020, tetapi juga memuat kekurangan-kekurangan yang ada sehingga dapat dirumuskan solusinya untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Melalui analisis pengukuran kinerja yang ada di dalam LKjIP tersebut diharapkan segenap *stakeholders* di Pemerintah Kabupaten Wajo dapat secara bersama-sama berperan aktif dan bekerjasama guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Wajo di tahun-tahun selanjutnya.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Wajo pada tahun 2020 dapat dikatakan **Memuaskan**. Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Wajo 2020.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa dari 15 sasaran strategis dengan 19 indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam

PK Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2020 menunjukkan bahwa :

- a. 4 (Empat) indikator kinerja dengan kategori sangat Memuaskan.
- b. 8 (Delapan) indikator kinerja dengan kategori Memuaskan.
- c. 5 (Lima) indikator kinerja dengan kategori Kurang Memuaskan.
- d. 2 (dua) indikator kinerja belum ada data

Walaupun secara umum menunjukkan tren positif, namun capaian beberapa indikator belum seperti yang diharapkan yang berkategori Kurang Memuaskan sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya. Beberapa hal yang perlu juga menjadi perhatian terkait hasil pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2020, antara lain:

1. Kurang adanya pemahaman dan komitmen dalam pencapaian target kinerja sasaran untuk pencapaian tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan di dalam RPJMD. Umumnya dalam pelaksanaan program tahunan yang tertuang didalam RKPD, penganggaran program dan kegiatan Perangkat Daerah masih bersifat *project oriented*, belum berorientasi pada pencapaian sasaran yang telah tertuang di dalam RPJMD ataupun sasaran strategis. Sehingga terdapat program-program yang kurang relevan dengan pencapaian sasaran tetap memperoleh alokasi pendanaan yang relatif besar. Oleh karena itu perlu adanya komitmen atau penegasan agar program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar mengacu pada prioritas daerah.
2. Kurang pemahaman SDM aparatur dalam menyikapi perubahan aturan pengelolaan keuangan maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga dalam pengusulan dan atau pelaksanaan kegiatan masih sering dijumpai adanya program pembangunan yang kurang selaras dengan sasaran strategis dan prioritas pembangunan yang merupakan kebutuhan mendasar masyarakat.
3. Kurang tepat dalam menentukan target bahkan target tidak direvisi padahal terjadi perubahan anggaran (*refocusing*) akibat pandemi Covid-19;
4. Kurangnya suplai data dari perangkat daerah penanggung jawab pemenuhan target kinerja Pemerintah Daerah sehingga penentuan capaian kinerja mengalami banyak hambatan dan keterlambatan.

Untuk itu, kedepan perlu dilakukan beberapa perbaikan agar target kinerja dapat dicapai sesuai dengan yang ditetapkan, antara lain :

1. Perlu adanya pemahaman kepada masing-masing Perangkat Daerah, bahwa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan harus tetap berpedoman pada capaian kinerja yang telah tertuang didalam RPJMD. Sehingga program/kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan adalah program/kegiatan yang langsung mengarah pada pencapaian sasaran, tujuan, misi dan visi Kabupaten Wajo. Terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak secara langsung mengarah pada prioritas dalam pencapaian sasaran, misi dan visi dapat dieliminasi atau dikurangi porsi penganggarnya.
2. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara penuh agar segera diterapkan dimasing-masing Perangkat Daerah sehingga terjalin suatu keterkaitan antara perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja, sehingga perencanaan program dan kegiatan mengarah pada pencapaian sasaran, misi dan visi RPJMD.
3. Perlu segera dibangun Sistem Pengelolaan Data Kinerja yang meliputi sistem pengumpulan data kinerja dan cara pengukuran kinerja. Hal ini dimaksudkan agar ukuran kinerja yang digunakan sebagai tolok ukur pelaksanaan kegiatan dapat benar-benar dipahami oleh masing-masing Perangkat Daerah. Untuk efektifitas perlu adanya suatu sistem pengumpulan data base secara elektronik melalui jaringan intranet maupun internet untuk validasi dan mempermudah dalam analisa kebijakan.

Semoga, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Wajo. Prestasi kinerja yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Wajo bersama dengan *stakeholder* yang dibingkai semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai kekurangan yang ada, tentunya menjadi pemacu untuk memotivasi agar lebih bersemangat dalam bekerja dan berusaha demi terwujudnya Kabupaten Wajo Yang amanah, maju dan Sejahtera.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Diagram	x
BAB I	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Aparat Pemerintah	2
1.3 Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo	3
1.4 Isu Strategis	6
1.4.1 Isu Strategis Internasional	6
1.4.2 Isu Strategis Nasional	11
1.4.3 Isu Strategis Daerah	15
1.4.4 Sistematika Penulisan	19
BAB II	21
2.1 Visi	21
2.2 Misi	22
2.3 Tujuan dan Sasaran	23
2.4 Rencana Kerja 2020	29
BAB III	31
3.1 Pengukuran Kinerja	31
3.2 Capaian Kinerja	35
3.2.1 Sasaran I Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan Daerah.	35
3.2.2 Sasaran 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	39
3.2.3 Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar	42
3.2.4 Sasaran 4 Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia	44
3.2.5 Sasaran 5 Meningkatnya Derajat Pendidikan dan Literasi Masyarakat	45

3.2.6 Sasaran 6 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.	46
3.2.7 Sasaran 7 Terpeliharanya Kehidupan Religius Masyarakat.	47
3.2.8 Sasaran 8 Meningkatnya Partisipasi Dan Keberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan.	49
3.2.9 Sasaran 9 Meningkatkan Daya Saing Infrastruktur Daerah	50
3.2.10 Sasaran 10 Meningkatnya Konektivitas Wilayah	51
3.2.11 Sasaran 11 Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	53
3.2.12 Sasaran 12 Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah	54
3.2.13 Sasaran 13 Meningkatnya Produktivitas Sektor Ekonomi Unggulan	56
3.2.14 Sasaran 14 Meningkatnya Kualitas Hidup Lapisan Masyarakat Miskin.	57
3.2.15 Sasaran 15 Berkembangnya lapangan kerja dan lapangan usaha.	59
3.3 Realisasi Anggaran	60
3.3.1 Pendapatan	60
3.3.2 Belanja Tidak Langsung	61
3.3.3 Belanja Langsung	61
3.3.4 Pembiayaan Daerah	61
3.3.5 Penghargaan	62
BAB IV	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Visi Pemerintah Kabupaten Wajo	24
Tabel 2.2 Tabel Misi Pemerintah Kabupaten Wajo	25
Tabel 2.3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Wajo	27
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja/Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2020	31
Tabel 3.1 Makna Konotasi Positif	34
Tabel 3.2 Makna Konotasi Negatif	34
Tabel 3.3 Pencapaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Wajo	35
Tabel 3.3.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	62

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1 Capaian IKU (Indikator Kinerja Utama)

36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan berupa fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan dengan mengedepankan wewenang yang mengacu pada asas-asas umum pemerintahan sebagaimana amanat Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 3 dengan tujuan menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan, dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, salah satunya dapat diukur melalui penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci akhir dari proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selanjutnya, sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; setiap Pemerintah Daerah diminta untuk menyampaikan **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)** kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKjIP Pemerintah Daerah Kabupaten disampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 Aparat Pemerintah

Keadaan Aparat Pemerintah dilingkungan Kabupaten untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada Tahun 2020 berjumlah 6.972 orang yang terdiri dari :

Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan:

a. Jenis Kelamin

	L	P	JUMLAH
KAB. WAJO	2.296	3.676	5.972

b. Pendidikan

	S.3			S.2			S.1			D.IV			D.III			D.II			D.I			SMA			SMP			SD			JUMLAH
	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	
KAB. WAJO	2	2	4	311	211	522	1.412	2.458	3.870	19	82	101	81	383	464	58	172	230	3	5	8	361	344	705	34	17	51	15	2	17	5.972

d. Golongan/Ruang

	GOLONGAN IV								GOLONGAN III								GOLONGAN II								GOLONGAN I								TOTAL				
	IV/d		IV/c		IV/b		IV/a		JUMLAH	III/d		III/c		III/b		III/a		JUMLAH	II/d		II/c		II/b		II/a		JUMLAH	I/d		I/c		I/b		I/a		JUMLAH	
	L	P	L	P	L	P	L	P		L	P	L	P	L	P	L	P		L	P	L	P	L	P	L	P		L	P	L	P	L		P	L		P
KAB. WAJO	1	1	34	5	486	759	282	477	2.045	272	427	331	571	272	526	211	414	3.024	54	87	147	183	117	183	59	35	865	5	5	22	2	3	-	-	1	38	5.972

f. Jabatan

	ESELON															JFU			JFT			JUMLAH						
	II.a			II.b			III.a			III.b			IV.a			IV.b			V.a				L	P	JML	L	P	JML
	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML										
KAB. WAJO	1	-	1	25	4	29	39	16	55	73	36	109	271	260	531	102	106	208	-	-	-	728	825	1.553	1.057	2.429	3.486	5.972

1.3 Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo

Perangkat daerah yang merupakan pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 208 sampai dengan Pasal 235, menyebutkan bahwa perangkat daerah kabupaten/kota terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan. Pemerintah Kabupaten Wajo dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang isinya menetapkan organisasi perangkat daerah.

Kabupaten Wajo terdiri atas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Dinas Daerah terdiri dari 17 dinas, serta Badan terdiri dari 5 dan 2 Rumah Sakit Umum Daerah dan 14 Kecamatan. Perangkat Daerah dimaksud bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran perangkat daerah Kabupaten Wajo, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
 - a. Sekretariat Daerah merupakan Unsur Staf Pendukung Kepala Daerah.
 - b. Sekretariat DPRD merupakan unsur staf pendukung DPRD.

- c. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah.
- d. Dinas Daerah terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan, ;
 2. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat;
 6. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 7. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
 8. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
 9. Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 10. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur Pelaksana urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 13. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 14. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, bidang persandian dan bidang statistik ;
 15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 16. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemuda dan olah raga dan bidang pariwisata;
 17. Dinas Perikanan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur penjunjang urusan pemerintahan bidang sub urusan bencana;

5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penjunjang urusan pemerintahan bidang sub urusan kesatuan bangsa dan politik.
- f. Rumah Sakit terdiri dari :
1. Rumah Sakit Umum Lamaddukelleng merupakan unsur penjunjang urusan pemerintahan bidang sub urusan Kesehatan;
 2. Rumah Sakit Umum Siwa merupakan unsur penjunjang urusan pemerintahan bidang sub urusan Kesehatan.
- g. Kecamatan terdiri dari :
1. Kecamatan Majauleng;
 2. Kecamatan Sabbangparu;
 3. Kecamatan Tanasitolo;
 4. Kecamatan Bola;
 5. Kecamatan Pammana;
 6. Kecamatan Pitumpanua;
 7. Kecamatan Takkalalla;
 8. Kecamatan Tempe;
 9. Kecamatan Belawa;
 10. Kecamatan Maniangpajo;
 11. Kecamatan Gilireng;
 12. Kecamatan Keera;
 13. Kecamatan Penrang;
 14. Kecamatan Sajoanging.

1.4 Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar mendesak, berjangka menengah / Panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

1.4.1 Isu Strategis Internasional

Pada Isu Strategis Internasional meliputi :

a. Isu tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals / SDGs*)

Tujuan pembangunan dalam Millennium Development Goals

(MDGs) sebagai nomenklatur tidak akan berhenti pada tahun 2015. Agenda ke depan untuk melanjutkan MDGs, dikembangkan suatu konsep dalam konteks kerangka/agenda pembangunan pasca 2015, yang disebut Sustainable Development Goals (SDGs). Perbedaan terlihat jelas antara MDGs dan SDGs adalah permasalahan isu lingkungan global lebih ditekankan dan diprioritaskan. Sehingga program baru ini merupakan hasil evaluasi terhadap perubahan selama 15 tahun program MDGs berjalan.

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu depletion sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, food and energy security, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Kerangka Pembangunan Pasca 2015 menjadi salah satu isu yang dibahas di KTT Rio. Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu, pertama indikator yang melekat pada pembangunan manusia (Human Development), di antaranya pendidikan, kesehatan. Indikator kedua yang melekat pada lingkungan kecilnya (Social Economic Development), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, indikator ketiga melekat pada lingkungan yang lebih besar (Environmental Development), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Dalam penyusunan indikator dalam konsep SDGs pasca MDGs 2015, selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan, ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan. Di antaranya segala sesuatu itu harus terukur, tidak terlepas dari prinsip Environmental Sustainability, Economic Sustainability dan Social Sustainability, serta juga ditentukan apakah ini difokuskan pada negara berkembang atau negara maju. Secara Global terdapat 17 Goals yang mesti dicapai hingga 2030 yaitu:

- 1) Mengentaskan kemiskinan dari segala bidang;
- 2) Pengentasan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan

peningkatan nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan;

- 3) Memastikan tingkat kesehatan dan usia hidup, untuk semua usia;
- 4) Memastikan kesamaan kualitas pendidikan dan mempromosikan peluang pembelajaran untuk semua pihak;
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak;
- 6) Memastikan keberadaan dan keberlanjutan pengelolaan air dan sanitasi untuk semua;
- 7) Memastikan akses, daya dukung, dan keberlanjutan energi untuk semua;
- 8) Mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, pekerja yang produktif untuk semua pihak;
- 9) Membangun infrastruktur yang memiliki reliansi, dan mendukung industriisasi yang berkelanjutan, keterbukaan serta mendukung inovasi;
- 10) Menurunkan ketidakadilan dalam dan antar Negara;
- 11) Membentuk kota dan pemukiman masyarakat, aman, kuat dan berkelanjutan;
- 12) Memastikan keberlanjutan konsumsi dan pola-pola produksi;
- 13) Beraksi dalam mencegah perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Konservasi dan sumberdaya laut, samudera dan pantai untuk pembangunan berkelanjutan;
- 15) Melindungi, mengembalikan, dan mendorong pemanfaatan ekosistem teresterial secara berkelanjutan, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, mencegah/menghentikan penggurunan, dan mencegah degradasi dan hilangnya keragaman hayati;
- 16) Mendukung perdamaian dan ketebukaan masyarakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dapat dipertanggungjawabkan dan kelembagaan terbuka pada setiap level; dan
- 17) Penguatan implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan daerah memerlukan sinergi kebijakan perencanaan

di Kabupaten Wajo. Target-target SDGs di Kabupaten Wajo telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. Jumlah tujuan yang telah dilaksanakan nasional sejumlah 17 tujuan (goals) oleh Pemerintah Kabupaten Wajo dan mencapai target sejumlah 12 tujuan (goals) dan 44 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Wajo.

b. Perdagangan bebas melalui pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA),

Globalisasi telah merambah hampir disemua ranah kehidupan masyarakat, baik itu bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), budaya, pendidikan dan lain-lain. Walaupun istilah globalisasi telah menjadi suatu kosakata yang umum, tetapi suka atau tidak suka, masyarakat diseluruh pelosok dunia sekarang ini telah hidup dalam suatu habitat global, transparan, tanpa batas, saling mengait (*linkage*), dan saling ketergantungan (*interdependence*). Skenario liberalisasi melalui perjanjian perdagangan bebas memberikan dampak keseluruh pelosok negeri. Contoh globalisasi yang nyata dirasakan saat ini seperti masuknya barang-barang impor dari China dan negara-negara ASEAN lainnya akan menyerbu sampai ke desa-desa. Indonesia sekarang ini berada didalam kondisi yang sangat terbuka dan sangat bersaing. Pemberlakuan perdagangan bebas memberi dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dunia yang tanpa batas, keluar masuk barang yang intens serta interaksi dengan dunia luar disatu sisi memberikan dampak positif bagi perkembangan masyarakat melalui upaya peningkatan kualitas dan inovasi produk lokal. Namun disisi yang lain, pemberlakuan ini dapat menambah penderitaan sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih berada dibawah garis kemiskinan. Mereka digiring kepada sebuah dunia dimana kekuatan pasar menjadi panglima. Hilangnya subsidi dan peranan dari negara dalam bidang ekonomi berdampak *multiplier effect* pada kemiskinan yang meningkat dan akan mengarah pada tingginya angka kriminal. Hal ini mengakibatkan kerja keras pemerintah, yakni

mengerjakan dua hal sekaligus, yakni perbaikan ekonomi dan sekaligus melakukan reformasi terhadap masalah-masalah sosial. Kondisi sosial ekonomi serta semua potensi yang ada pada masyarakat Sulawesi Selatan, diharapkan pemerintah dapat menempuh suatu kebijakan yang rasional untuk mengantar masuk dalam kancah perekonomian global.

c. Perubahan Iklim dan Bencana Alam

Masalah lingkungan hidup berkelanjutan dengan beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain faktor iklim, faktor temperatur, faktor curah hujan, faktor kelembaban, faktor tekanan udara dan lain-lain. Akan tetapi selain faktor dimaksud, aktivitas manusia juga mempengaruhi masalah lingkungan hidup berkelanjutan terutama perubahan iklim dan bencana alam. Hal ini dapat dilihat dari maraknya penebangan hutan secara liar yang mempengaruhi perubahan suhu dan curah hujan secara lokal. Ketika area hutan yang hilang semakin luas, maka akibat yang ditimbulkan bukan lagi lokal tapi sudah berskala regional.

Pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak diimbangi oleh upaya penanggulangan yang mengatasnamakan kesejahteraan hidup manusia tampaknya akan berdampak negatif terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Hal ini tidak hanya mengancam keberlangsungan lingkungan alam, tetapi juga keberlangsungan hidup manusia sendiri. Isu pemanasan global dan perubahan iklim hanyalah sebagian dari sekian banyak isu lingkungan untuk diperhatikan yang tidak hanya bersifat lokal tetapi global, demikian halnya dengan Indonesia. Di Indonesia masih menghadapi tantangan besar di mana model pembangunan ekonomi yang dikembangkan telah menggerakkan pembangunan ekonomi yang cenderung bersifat ekstraktif atau mengandalkan eksploitasi sumberdaya alam secara langsung. Bahkan ada kecenderungan besar di mana upaya mempertahankan fungsi lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari masih jauh dari yang diharapkan. Penyebab Pemanasan Global ini cukup kompleks, meliputi meningkatnya gas rumah kaca seperti CO₂ dan Metana yang berasal dari Industri, Kendaraan bermotor dan makhluk hidup penghasil metana alamiah seperti bakteri. Selain itu juga

terjadinya kerusakan hutan alami akibat alih fungsi hutan menjadi pemukiman, industri, Pertanian dan fungsi lainnya. Sehingga luas hutan setiap tahunnya terus berkurang yang berakibat meningkatnya jumlah gas rumah kaca karena fungsi hutan sebagai paru-paru dunia berkurang.

1.4.2 Isu Strategis Nasional

Selain daripada itu, juga diperhatikan telahaan kebijakan pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024, guna menciptakan konsistensi perencanaan antara perencanaan pembangunan nasional dengan perencanaan pembangunan daerah. Dalam hal ini dapat di lihat dari agenda prioritas yang dirumuskan ke dalam beberapa isu strategis diantaranya :

a. Kewilayahan

- 1) Kesenjangan wilayah
- 2) Penguatan pertumbuhan pusat-pusat wilayah yang masih rendah
- 3) Pengelolaan urbanisasi yang belum optimal
- 4) Pemanfaatan ruang yang belum sesuai dan sinkron dengan rencana tata ruang
- 5) Rendahnya pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah
- 6) Rendahnya kepastian hukum hak atas tanah dan ketimpangan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah

b. Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing

- 1) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
- 2) Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk
- 3) Pemenuhan Layanan Dasar
- 4) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
- 5) Pengentasan Kemiskinan
- 6) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

c. Pertumbuhan Ekonomi Stagnan dan Defisit Transaksi Berjalan

Isu strategis pada prioritas nasional meliputi :

a. Isu Nasional

1) Infrastruktur

Konektivitas dengan kawasan produksi rakyat :

- a) Industri Kecil
- b) Ekonomi Khusus
- c) Pariwisata
- d) Persawahan
- e) Perkebunan
- f) Tambah Perikanan

2) Sumber Daya Manusia

Aksentuasi pada :

- a) Kesehatan ibu hamil, bayi, balita, anak usia sekolah
- b) Pendidikan Vokasi (keterampilan)
- c) Lembaga manajemen talenta

3) Investasi

Investasi terbuka untuk membuka lapangan kerja :

- a) Percepat proses perijinan
- b) Hilangkan semua hambatan

4) Reformasi Birokrasi

Reformasi struktural dan mindset :

- a) Struktural : sederhana, simple, lincah, cepat
- b) Mindset : adaptif, produktif, inovatif, kompetitif
- c) Monitoring dan Evaluasi

5) Pembangunan APBN

Fokus dan tepat sasaran, untuk memberi manfaat pada rakyat:

- a) Manfaat Ekonomi
- b) Manfaat sosial
- c) Kesejahteraan

b. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal bahwa ada 5 (lima) Urusan yang dilaksanakan, yaitu : Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Sosial, Urusan Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat. Dalam RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 terdapat 6 (enam) Perangkat Daerah penanggungjawab dengan

permasalahan, yakni :

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Dalam SPM di bidang pendidikan terdapat beberapa permasalahan yaitu permasalahan PAUD, permasalahan pendidikan dasar dan permasalahan kesetaraan. Namun pada indikator capaian SPM telah mencapai angka 90%. Tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, berikut permasalahan dalam bidang pendidikan :

- 1) Masih kurangnya sarana PAUD
- 2) Kurangnya tenaga pendidik PAUD kualifikasi PGSDTK
- 3) Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan dasar 9 tahun.
- 4) aksesibilitas antara lokasi sekolah dengan potensi siswa sekolah sesuai standar SPM
- 5) penyebaran sekolah yang masih belum merata.

b. Dinas Kesehatan;

Pelayanan SPM dibidang kesehatan dengan melihat tabel indikator capaian dimana pelayanan balita telah mencapai 77% dimana angka tersebut menurun ditahun sebelumnya. Dan untuk masalah pertolongan persalinan telah mencapai 86% dan juga menurun di tahun sebelumnya. Adapun permasalahannya sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya penerapan standarisasi pelayanan kesehatan
- 2) Belum optimalnya pelayanan kesehatan anak balita
- 3) Belum optimalnya keselamatan ibu melahirkan dan anak
- 4) Belum optimalnya pelayanan kesehatan lansia
- 5) Belum optimalnya pelayanan kesehatan pada masyarakat
- 6) Belum optimalnya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

c. Dinas Pekerjaan Umum , Penataan ruang dan Pertanahan

Pelayanan masyarakat dalam pemenuhan akses air minum telah mencapai angka 95% dimana angka tersebut telah terbilang cukup besar, namun masih terdapat daerah yang masih susah mendapat akses air minum Adapun permasalahan

yaitu :

- 1) Terbatasnya penyediaan dan pengelolaan air baku
- 2) Belum optimalnya pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
- 3) Belum optimalnya pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.

d. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Standar pelayanan masyarakat di bidang sosialpun masih terdapat beberapa masalah diantaranya yaitu :

- 1) Penerimaan bantuan tidak tepat sasaran disebabkan tidak adanya data yang akurat
- 2) Masih kurangnya penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial menerima jaminan sosial.

e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan

Adapun permasalahan yaitu :

- 1) Belum lengkapnya data tentang persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
- 2) Belum lengkapnya data dikarenakan data yang terhimpun berdasar dari aduan / laporan dari kepala desa.

f. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Dalam pelayanan bencana kebakaran angka yang tercatat yaitu sebesar 35% dimana angka ini masih terbilang sangat kecil, dan perlindungan masyarakat sebesar 13378,60%. Adapun permasalahan yang sering dihadapi yaitu :

- 1) Masih terbatasnya aparatur Polisi Pamong Praja yang mempunyai kompetensi
- 2) Belum optimalnya jangkauan pelayanan bencana kebakaran
- 3) Belum optimalnya intensitas cakupan petugas perlindungan masyarakat

Pada awal pelaksanaan RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 pelaksanaan SPM di Kabupaten Wajo belum optimal, hal ini di akibatkan

Petunjuk Teknis dari masing-masing kementerian belum dikeluarkan.

1.4.3 Isu Strategis Daerah

a. Pada level Daerah Sulawesi Selatan, terdapat beberapa isu strategis, yaitu :

1) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Selatan

Memastikan perekonomian terus bertumbuh secara cepat. Posisi Sulawesi Selatan yang secara historis menjadi penghubung Kawasan Indonesia Timur menjadi kekuatan yang tidak dimiliki daerah lain, namun hal tersebut tidaklah cukup. Kemudahan dalam berinvestasi, mendapatkan izin, dan kondisi yang stabil serta kondusif menjadi prasyarat utama sebuah perekonomian yang dinamis dan mendatangkan kesejahteraan bagi warganya. Kondisi Pemerintahan yang cenderung birokratis, tidak melayani, dan kaku hal ini membuat Sulawesi Selatan tidak menjadi pilihan utama untuk membuka usaha.

2) Kualitas Infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian

Kondisi infrastruktur jalan yang belum optimal, dimana jaringan jalan dalam kondisi baik pada tahun 2017 baru mencapai 37,07% dari panjang jalan 2.009,35 Km. Sedangkan pada kondisi jalan rusak cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2016 yakni 25,58 dan meningkat tahun 27,86 persen. Kondisi jalan rusak berat pada tahun 2013 adalah 7,35 persen turun pada tahun 2014 yakni 7,15 persen hingga tahun 2015 sebesar 4,85. Hal ini disebabkan karena ada peralihan kewenangan beberapa ruas jalan kabupaten menjadi ruas jalan provinsi dengan kondisi rusak parah yang berakibat menurunnya capaian kinerja ruas jalan provinsi secara akumulasi. Masih rendahnya persentase jalan provinsi dalam kondisi baik antara lain dikarenakan masih terdapat jalan provinsi dengan perkerasan berupa kerikil sepanjang 152,6 Km (7,59%) dan perkerasan berupa tanah sepanjang 211,52 Km (10,53%). Dengan hal ini perlunya adanya penanganan terhadap jalan yang rusak ini dapat segera diperbaiki agar tidak membahayakan para pengguna jalan.

3) Pemerataan Pendapatan bagi warga Sulawesi Selatan

Selain fokus terhadap pertumbuhan ekonomi, sebuah pemerintahan tidak bias melupakan pemerataan pendapatan warganya. Pemerataan dilakukan terhadap pendapatan perkapita

maupun pemerataan terhadap pembangunan wilayah. Pendapatan per kapita warga Sulawesi Selatan saat ini memang sudah meningkat mencapai 44 juta per tahunnya , tetapi jika dianalisa lebih mendalam, pendapatan ini belum dirasa oleh semua warga Sulawesi Selatan. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, pada tahun 2017 Sulawesi Selatan menjadi Provinsi yang memiliki ketimpangan pendapatan warga tertinggi kedua di Indonesia (0,429). Selain itu, jumlah orang miskin di Sulawesi Selatan masih cukup tinggi sebesar 9,48 % pada tahun 2016, diatas target yang ingin dicapai oleh Pemprov Sulawesi Selatan pada akhir masa periode tiga RPJPD, yaitu 6%.

4) Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berlimpah

Letak geografis yang strategis dan kondisi biofisik wilayah yang mendukung menyebabkan Sulawesi Selatan memiliki sumberdaya alam yang berlimpah. Potensi sumberdaya alam yang menjadi unggulan di Sulawesi Selatan antara lain; di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan/perikanan, pariwisata, energi dan pertambangan. Untuk sektor pangan, surplus hasil pertanian (padi/beras) selama 2 dekade terakhir memantapkan status sulawesi selatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional dan penghasil tanaman pangan terbesar di wilayah Indonesia Timur.

Sektor pariwisata juga menjadi sektor yang perlu dioptimalkan pengelolaannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Namun demikian, sumberdaya alam yang dimiliki belum dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Hasil produksi sumberdaya alam sebagian besar dikirim/diekspor dalam kondisi bahan mentah/bahan baku (belum diolah), padahal ada potensi pengolahan yang dapat memberikan nilai tambah (added value) dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Sulawesi Selatan. Tantangan lain terkait sumber daya alam adalah bagaimana menjaga agar pemanfaatan sumberdaya alam memberikan manfaat secara ekonomi namun tetap memperhatikan kemampuan daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga. Kebijakan pembangunan ekonomi harus berjalan bersama dengan

upaya menjaga kelestarian sumberdaya alam sehingga pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan.

b. Pada level daerah Kabupaten Wajo, isu strategis yang teridentifikasi meliputi :

- 1) Menurunkan angka kemiskinan, kemiskinan dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor utama yaitu pendidikan dan bonus demografi, berbeda dengan pendidikan formal, pendidikan informal (keterampilan) sangat berpengaruh pada kemiskinan. Pengaruh bonus demografi terhadap kemiskinan dipengaruhi oleh luas lahan, penambahan luas lahan sudah tidak memungkinkan olehnya itu pemantapan lahan secara efektif dan efisien menjadi satu-satunya solusi.
- 2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, sebagai daerah geografis makan ekonomi pertanian dan sejenisnya harus ditingkatkan. Dalam kaitannya dengan poin 1 (satu) diatas maka, integrated farming didalamnya dengan keterampilan yang memadai menciptakan siklus tanam, petik, olah dan jual yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- 3) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, seperti halnya pendidikan, kesehatan juga menjadi faktor utama pertumbuhan ekonomi, yang sejenisnya mendukung kesejahteraan masyarakat.
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi. Dalam tata kelola pemerintahan dilakukan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik sedangkan pada reformasi birokrasi berfokus pada reformasi sumber daya manusia yang berkompeten dan profesional dalam kerangka pengembangan sumber daya manusia;
- 5) Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang inklusif, sejalan dengan poin 1, pendidikan dan kemiskinan berada dalam 1 (satu) rantai yang saling mempengaruhi, minimnya pendidikan mempengaruhi peningkatan kemiskinan. Negara harus hadir menginterfensi pendidikan untuk mengurangi kemiskinan, peningkatan pendidikan berjalan tanpa membedakan gender dan faktor-faktor disabilitas.

- 6) Meningkatkan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak adalah hal mutlak dalam menjaga kelangsungan hidup suatu bangsa, olehnya itu negara harus aktif dalam mendukung pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
- 7) Meningkatkan kualitas infrastruktur pelayanan dasar masyarakat, infrastruktur pelayanan dasar masyarakat dibedakan dalam 2 (dua) hal yaitu infrastruktur sosial budaya dan infrastruktur ekonomi. Infrastruktur sosial budaya antara lain : infrastruktur kesehatan, pendidikan, ketertiban dan keamanan, infrastruktur ekonomi antara lain: jalan dan jembatan, prasarana pertanian, perdagangan dan pariwisata
- 8) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan masyarakat didukung oleh 4 (empat) hal penting yaitu pendidikan, kesehatan, kemandirian dan ketertiban, kehidupan religius.
- 9) Meningkatkan pengembangan inovasi daerah berbasis e-government, dalam menata kelola pemerintahan reformasi birokrasi dibutuhkan pengembangan inovasi daerah berbasis e-government untuk mengakselerasi pencapaian tujuan pembangunan daerah.
- 10) Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, bonus demografi akan berpengaruh jika ruang terbatas, sementara suatu wilayah dibatasi oleh ruang dan waktu, olehnya itu kebijakan pemanfaatan pengendalian tata ruang menjadi hal mutlak dalam suatu penyusunan perencanaan pembangunan.
- 11) Pemanfaatan Danau Tempe, Danau Tempe sudah ditetapkan sebagai danau yang berfungsi sebagai konservasi sumber daya air, olehnya itu pemanfaatan Danau Tempe harus dibatasi oleh fungsi konservasi tersebut. Pemerintah pusat telah mengupayakan berbagai usaha-usaha revitalisasi Danau Tempe. Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka pemanfaatan Danau Tempe oleh pemerintah kabupaten dapat dilakukan dalam bentuk antara lain : mengembangkan fungsi wisata Danau Tempe, mengembangkan fungsi transportasi Danau Tempe, mengembangkan fungsi irigasi Danau Tempe.
- 12) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup berkelanjutan,

pendayagunaan alam secara tak terbatas mengakibatkan degradasi lingkungan hidup yang pada akhirnya menurunkan potensi sumber daya alam, olehnya itu usaha peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan sangat dibutuhkan.

- 13) Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, fungsi pemerintah adalah sebagai pelayan masyarakatnya, olehnya itu pemerintah menetapkan standar pelayanan minimal melalui keputusan menteri dimana hal tersebut menjadi prioritas pertama dalam pembangunan. Dalam pelaksanaan prioritas tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
- 14) Meningkatkan daya saing komparatif dan kompetitif daerah; dan
- 15) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang inklusif, keberhasilan program pembangunan daerah diawali oleh suatu proses perencanaan yang baik, dengan proses perencanaan yang baik akan meningkatkan perencanaan pembangunan tersebut. Dan dalam pelaksanaan tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang inklusif.

1.4.4 Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2020, LKjIP Kabupaten Wajo Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pengantar LKjIP Tahun 2020 berupa Keadaan Aparat Pemerintah dilingkungan Kabupaten Wajo untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, kewenangan, Tugas Pokok Organisasi serta Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Isu-isu Strategis.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi gambaran umum uraian Rencana Strategis yang menjabarkan Visi, Misi, dan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam konteks rencana jangka menengah, Rencana Kerja Instansi

Pemerintah Daerah Tahun 2020, serta Rencana Kinerja Tahun 2020, sebagai gambaran dan acuan dalam penyusunan LKjIP Tahun 2020, yang memuat program, kegiatan, dan target capaian dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis Instansi Pemerintah serta Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi uraian evaluasi capaian kinerja per-sasaran dan pertujuan, analisis capaian kinerja per-sasaran dan per-tujuan, termasuk termasuk faktor pendorong keberhasilan, permasalahan, kendala utama, dan langkah strategi penanganannya serta perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan yang menggambarkan realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tahun 2020 terkait dengan tugas pokok dan tugas-tugas strategis lainnya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 yang dirangkum ke dalam kesimpulan terhadap Akuntabilitas Kinerja serta Rencana Tindak Lanjutnya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Data-data pendukung penjelasan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja perangkat daerah pada tahun 2020.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Kabupaten Wajo untuk periode RPJMD 2019-2024 adalah sebagai berikut :

“ Pemerintah Amanah, Menuju Wajo yang Maju dan Sejahtera “

Rumusan visi ini mengandung 3 (tiga) pokok visi di dalamnya yakni amanah, maju dan sejahtera. Ketiga pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2024 dimana terjemakan Kabupaten Wajo “Maju dan sejahtera”. Berdasarkan pemahaman itu maka penjelasan visi Pemerintah Kabupaten Wajo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Penjelasan Visi Pemerintah Kabupaten Wajo

VISI	POKOK VISI	PENJELASAN POKOK VISI
Pemerintah Amanah, Menuju Wajo yang Maju dan Sejahtera	Amanah	Kondisi pemerintahan yang memenuhi kaidah tata kelola yang baik serta menghasilkan pelayanan publik yang memuaskan berdasarkan nilai-nilai dasar masyarakat Wajo
	Maju	Kondisi wilayah Kabupaten Wajo yang memiliki infrastruktur berdaya saing dalam mendukung kemajuan daerah
	Sejahtera	Kondisi masyarakat dengan kualitas manusia yang tinggi dan tingkat kehidupan ekonomi yang berkecukupan

2.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya pokok yang hendak dijalankan untuk mewujudkan visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Olehnya itu, maka rumusan misi Pemerintah Kabupaten Wajo 2019-2024 seperti berikut.

Tabel 2.2

Perumusan Penjelasan Misi Pemerintah Kabupaten Wajo 2019-2024

No.	Misi	Penjelasan Misi	Pokok visi
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah	Misi ini mencakup upaya-upaya pokok dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan meningkatkan kualitas birokrasi yang profesional dan melayani masyarakat secara akuntabel, transparan, partisipatif melalui reformasi birokrasi dan pemanfaatan teknologi.	Amanah
2.	Meningkatkan kualitas kehidupan yang cerdas, sehat dan beriman	Misi ini mencakup upaya-upaya pokok dalam pemenuhan layanan kehidupan kesehatan sesuai standar, pemenuhan layanan pendidikan, pemerataan pendidikan dan kualitas pendidikan pada setiap jenjang Pendidikan serta kondisi perikehidupan yang nyaman dalam arti aman dan kondusif dengan mengedepankan nilai karakter agama pada setiap tingkah laku dan perbuatannya	Sejahtera

No.	Misi	Penjelasan Misi	Pokok visi
3.	Meningkatkan konektivitas dan infrastruktur dasar daerah yang berwawasan lingkungan	Misi ini mencakup upaya-upaya pokok dalam mengelola wilayah dengan membangun infrastruktur dasar masyarakat secara adil dan merata, serta memperhatikan aspek lingkungan hidup berkelanjutan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Maju
4.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang merata dan berkeadilan	Misi ini mencakup upaya-upaya pokok dalam memanfaatkan dan menggerakkan potensi sektor unggulan daerah untuk meningkatkan produktivitas, daya saing kompetitif dan daya saing komparatif daerah. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperluas akses masyarakat dan dunia usaha untuk lebih mudah berusaha dan mengembangkan usaha sehingga dapat menurunkan kesenjangan antar pendapatan dan menurunkan tingkat kemiskinan	Sejahtera

2.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja, maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran.

Berdasarkan rumusan visi dan misi, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.3

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Wajo

Visi : Pemerintah Amanah, Menuju Wajo yang Maju dan Sejahtera

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target Kinerja						Kondisi Akhir
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah	1 Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dalam pemerintahan daerah		1 Indeks Reformasi Birokrasi		76,27	78,5	82,5	85,5	88,5	90,5	92,5	92,5
				1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		50,95 / CC	50,95 / CC	60 / CC	65 / B	70 / BB	80 / BB	90 / A	90 / A
				3 Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				2 Meningkatkan kualitas pelayanan dasar				-	62	67	72	77	82
2	Meningkatkan kualitas tatanan kehidupan	2 Meningkatkan kualitas manusia seutuhnya		5 Indeks Pembangunan Manusia	68,18	68,78*	69,38	69,98	70,58	71,18	71,78	72,38	72,38

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target Kinerja						Kondisi Akhir		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
	masyarakat yang cerdas, sehat dan beriman		Meningkatnya derajat pendidikan dan literasi masyarakat	6	Angka Harapan Lama Sekolah	13,09	13,24*	13,3	13,36	13,42	13,48	13,54	14	14	
				7	Angka Rata2 Lama Sekolah	6,78	6,89*	7,22	7,55	7,88	8,21	8,54	8,87	8,87	
			4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	8	Angka Harapan Hidup	66,52	66,68*	67,87	69,06	70,25	71,43	72,62	73,81	73,81
					9	% Mesjid dan rumah ibadah lainnya dalam kualitas baik		50*	58,33	66,67	75	83,33	91,67	100	100
			6	Meningkatnya partisipasi dan keberdayaan perempuan dalam pembangunan	10	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,9	90,02*	90,14	90,26	90,38	90,5	90,62	90,74	90,74
					11	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60,62	60,832*	61,044	61,256	61,468	61,68	61,892	62,104	62,104
3	Meningkatkan konektivitas dan infrastruktur	3	Meningkatkan daya saing infrastruktur daerah	12	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah			24	25	26	27	28	29	30	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target Kinerja						Kondisi Akhir
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	dasar daerah yang berwawasan lingkungan		7 Meningkatnya konektivitas wilayah	13 % jalan yang menjangkau desa dengan baik sepanjang tahun		17	24	31	39	46	53	60	60
			8 Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup daerah	14 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (%)	57,8	61,32	61,03	61,03	61,04	61,05	61,06	61,07	61,07
4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang merata dan berkeadilan	4 Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah		15 % Pertumbuhan ekonomi	5,22	5,46*	6,06	6,66	7,26	7,86	8,46	9,06	9,06
				16 PDRB/kapita (juta)	45,24	47,35*	49,46	51,57	53,67	55,78	57,89	60	60
				17 Indeks Gini Ratio	0,369	0,353	0,350	0,345	0,342	0,339	0,337	0,330	0,330
			9 Meningkatnya produktivitas sektor ekonomi unggulan	18 Kontribusi sektor pertanian, kehutanan & perikanan dalam PDRB (%)	34,9	35,62*	36,34	37,06	37,78	38,5	39,22	39,94	39,94

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target Kinerja						Kondisi Akhir
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			10 Meningkatkan kualitas hidup lapisan masyarakat miskin	19 % Penduduk miskin	7,38	7,15*	6,91	6,68	6,44	6,21	5,97	5,74	5,74
			11 Berkembangnya lapangan kerja dan lapangan usaha	20 Tingkat pengangguran terbuka	3,06	3,79	3,67	3,54	3,42	3,29	3,17	3,04	3,04

Ket : * proyeksi/perkiraan.

2.4 Rencana Kerja 2020

Rencana kerja tahun 2020 Kabupaten Wajo merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Bagian-Bagian melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Sebagaimana yang telah diuraikan mengenai tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah Kabupaten Wajo yang telah dirumuskan dan ditetapkan didalam RPJMD 2019 – 2024 yaitu 15 Sasaran dan 19 Indikator Kinerja Utama sehingga diperoleh Tabel Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dalam pemerintahan daerah	1	Indeks Reformasi Birokras	82,5
1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	2	Nilai SAKIP	B
		3	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP
1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan dasar	4	Indeks Kepuasan Masyarakat	62
2	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia	5	Indeks Pembangunan Manusia	69,98
2.1	Meningkatnya derajat pendidikan dan literasi masyarakat	6	Angka Rata2 Lama Sekolah	7,55
2.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	7	Angka Harapan Hidup	69,06
2.3	Terpeliharanya kehidupan religius masyarakat	8	% Mesjid dan rumah ibadah lainnya dalam kualitas baik	66,67
2.4	Meningkatnya partisipasi dan keberdayaan perempuan dalam pembangunan	9	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,26
		10	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61,256
3	Meningkatkan daya saing infrastruktur daerah	11	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	25

2.5	Meningkatnya konektivitas wilayah	12	% jalan yang menjangkau desa dengan baik sepanjang tahun	31
2.6	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup daerah	13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (%)	61,03
4	Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah	14	% Pertumbuhan ekonomi	6,66
		15	PDRB/kapita (juta)	51,57
		16	Indeks Gini Ratio	0,345
3.1	Meningkatnya produktivitas sektor ekonomi unggulan	17	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan & perikanan dalam PDRB (%)	37,06
3.2	Meningkatnya kualitas hidup lapisan masyarakat miskin	18	% Penduduk miskin	6,68
3.3	Berkembangnya lapangan kerja dan lapangan usaha	19	Tingkat pengangguran terbuka	3,54

Sumber : Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Wajo 2020

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pemerintah Kabupaten Wajo selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Wajo melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Wajo yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2020.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020, dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran pada masing-masing indikator kinerja sasaran yang dicapai. Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang. Skala pengukuran kinerja dipergunakan dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, dengan menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut :

Terdapat dua jenis skala penilaian pengukuran:

- a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 100%	Sangat Memuaskan
3	75% sampai 100%	Memuaskan
2	55% sampai 75%	Cukup Memuaskan
1	Kurang dari 55%	Kurang Memuaskan

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 3.2

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Kurang Memuaskan
2	75% sampai 100%	Cukup Memuaskan
3	55% sampai 75%	Memuaskan
4	Kurang dari 55%	Sangat Memuaskan

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Wajo 2020 ini akan dijelaskan capaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Wajo sesuai indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam RPJMD Kabupaten Wajo. Pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo secara ringkas digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Perjanjian Kinerja/Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kabupaten Wajo
Tahun 2020

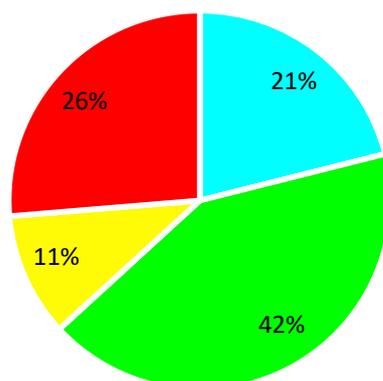
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	NILAI
1	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dalam pemerintahan daerah	1	Indeks Reformasi Birokrasi	82,5	-	-	-
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	2	Nilai SAKIP	B	-	-	-
		3	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	100,00%	Memuaskan
3	Meningkatnya kualitas pelayanan dasar	4	Indeks Kepuasan Masyarakat	62	80,33	111,58%	Sangat Memuaskan
4	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia	5	Indeks Pembangunan Manusia	69,98	69,15	98,81%	Memuaskan
5	Meningkatnya derajat pendidikan dan literasi masyarakat	6	Angka Rata2 Lama Sekolah	7,55	6,81	90,20%	Memuaskan
6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	7	Angka Harapan Hidup	69,06	67,35	97,52%	Memuaskan
7	Terpeliharanya kehidupan religius masyarakat	8	% Mesjid dan rumah ibadah lainnya dalam kualitas baik	66,67	78,14	117,20%	Sangat Memuaskan
8	Meningkatnya partisipasi dan keberdayaan perempuan dalam pembangunan	9	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,26	90	99,71%	Memuaskan
		10	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61,25	61	99,59%	Memuaskan
9	Meningkatkan daya saing infrastruktur daerah	11	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	25	0,92	3,68	Kurang Memuaskan
10	Meningkatnya konektivitas wilayah	12	% jalan yang menjangkau desa dengan baik sepanjang tahun	31	45,18	145,74%	Sangat Memuaskan
11	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup daerah	13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (%)	61,03	60,91	99,80%	Memuaskan
12	Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah	14	% Pertumbuhan ekonomi	6,66	-1,17	-17,57%	Kurang Memuaskan
		15	PDRB/kapita (juta)	51,57	49,58	94,22%	Memuaskan
		16	Indeks Gini Ratio	0,345	0,355	102,90%	Kurang Memuaskan
13	Meningkatnya produktivitas sektor ekonomi unggulan	17	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan & perikanan dalam PDRB (%)	37,06	33,76	91,10%	Sangat Memuaskan
14	Meningkatnya kualitas hidup lapisan masyarakat miskin	18	Persentase Penduduk miskin	6,68	6,95	104,04%	Kurang Memuaskan
15	Berkembangnya lapangan kerja dan lapangan usaha	19	Tingkat pengangguran terbuka	3,54	4,33	122,31%	Kurang Memuaskan

Keterangan Warna :

-  = Sangat Memuaskan
-  = Memuaskan
-  = Cukup Memuaskan
-  = Kurang Memuaskan

Diagram 1
Capaian IKU (Indikator Kinerja Utama)

■ Sangat Memuaskan ■ Memuaskan ■ Belum ada data ■ Kurang Memuaskan



Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 sebanyak 19 (Sembilan belas) indikator, dan dari jumlah tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- Sangat Memuaskan sebanyak 4 indikator
- Memuaskan sebanyak 8 indikator
- Kurang memuaskan 5 indikator
- Belum ada data 2 indikator

Dari 19 IKU di atas, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 21% telah memenuhi kriteria sangat memuaskan, 42% telah memenuhi kriteria memuaskan, 26% masuk kriteria kurang memuaskan dan 11% belum ada kriteria karena belum ada hasil penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU Kabupaten Wajo Tahun 2020 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.

3.2 Capaian Kinerja

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum Pemerintah Kabupaten Wajo tahun 2020 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan tahun 2020 dengan berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

3.2.1 Sasaran I Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan Daerah.

Analisis pencapaian sasaran 1 dapat dijelaskan dengan melihat Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini sebagai berikut :

3.2.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Realiasi		
	2020	2018	2019	2020
Indeks Reformasi Birokrasi	82,5	55,55	60,08	-
Capaian (%)				-

Sumber: Perangkat Daerah yang bersangkutan Tahun 2021

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia sehingga pada indikator ini belum dapat diukur pencapaiannya.

3.2.1.2 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Walaupun belum diukur pencapaian kinerjanya, namun dapat dikemukakan faktor keberhasilan/peningkatan pencapaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi didukung dengan adanya:

1. Manajemen Perubahan

Indikator ini diberikan tanggung jawab kepada Sekretariat Daerah

dalam hal ini Bagian Organiasasi sebagai leading sektor pemenuhan indikator tersebut. Pada indikator ini Bagian Organisasi telah memenuhi manajemen perubahan dengan membentuk Tim Reformasi Birokrasi tingkat Kabupaten Wajo, telah menyusun Road Map Reformasi Biroktasi Kabupaten Wajo, dan telah melakukan pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah pilot project.

2. Penataan dan Penguatan Organisasi

Indikator ini diberikan tanggung jawab kepada Sekretariat Daerah dalam hal ini Bagian Organisasi sebagai leading sektor pemenuhan indikator. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan Bagian Organisasi yaitu telah melakukan penataan organisasi, evaluasi kelembagaan dan telah menindaklanjutinya dengan perubahan kedudukan dan susunan organisasi dan tata kerja beberap perangkat daerah.

3. Penguatan Akuntabilitas

Indikator ini diberikan tanggung jawab kepada Sekretariat Daerah dalam hal ini Bagian Organisasi sebagai leading sektor pemenuhan aspek Pelaporan dan Capaian Kinerja, Bappelitbangda pada Aspek Perencanaan dan Pengukuran Kinerja dan Inspektorat Daerah pada aspek evaluasi internal. Unit kerja lainnya bertanggung jawab dalam memenuhi pencapaian indikator utama kabupaten sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

4. Penataan Tata Laksana

Indikator ini diberikan tanggung jawab kepada Sekretariat Daerah dalam hal ini Bagian Organiasasi sebagai leading sektor pemenuhan aspek pemenuhan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur dan Dinas Kominfotik pada aspek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi dan transformasi digital yang memberikan manfaat. Pada aspek peta proses bisnis belum optimal dilaksanakan karena terkena reconfusing anggaran sehingga tidak dilaksanakan.

5. Deregulasi Kebijakan

Indikator ini diberikan tanggung jawab kepada Sekretariat Daerah dalam hal ini Bagian Hukum sebagai leading sektor pemenuhan indikator tersebut telah melakukan autentifikasi dalam rangka harmonisasi kebijakan, telah dilakukan identifikasi, analisis, dan

pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat yang akan direvisi/dihapus dan telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat.

6. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Indikator ini diberikan tanggung jawab kepada BKPSDM sebagai leading sektor pemenuhan indikator tersebut telah berhasil meningkatkan pencapaian sistem merit. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan yaitu Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi, Proses Penerimaan Pegawai Transparan, Objektif, Akuntabel, dan Bebas KKN, Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi, Promosi Jabatan dilakukan secara Terbuka, Penetapan Kinerja Individu, Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai dan Sistem Informasi Kepegawaian melalui SICAKEP

7. Penguatan Pengawasan

Indikator ini diberikan tanggung jawab kepada Inspektorat sebagai leading sektor pemenuhan indikator tersebut. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan yaitu Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi, Penerapan SPIP, dan Pengaduan Masyarakat. Maturitas SPIP Pemerintah Kab. Wajo dengan capaian Level III untuk hasil penilaian BPKP Tahun 2019. Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo optimis dapat mencapai hasil yang sama untuk penilaian SPIP Tahun 2020. Terlebih bahwa telah dilaksanakan penilaian awal secara mandiri SPIP Tahun 2020 oleh masing-masing Perangkat Daerah pada awal Tahun 2021 yang menjadi bahan evaluasi internal oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo. Kapabilitas APIP Pemerintah Kab. Wajo dengan capaian Level III untuk hasil penilaian BPKP Tahun 2019. Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo optimis dapat mencapai hasil yang sama untuk penilaian APIP Tahun 2020. Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo dalam usaha meraih capaian yang sama untuk Tahun 2020 telah melaksanakan Telaahan Sejawat lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo yang menjadi penjamin mutu pengawasan secara internal sebelum dievaluasi oleh BPKP. Penanganan kasus dan aduan, serta pemeriksaan atas permintaan stakeholder dengan realisasi 100%, Pemantauan dan penyelesaian tindak lanjut hasil

pengawasan dengan target 88,2% terealisasi 89,0%. Capaian tersebut terbilang cukup signifikan dibandingkan dengan capaian beberapa tahun terakhir. Penyampaian laporan LHKPN bagi Wajib Lapo telah mencapai 100% pada Januari 2021. Whistle Blowing System telah diinisiasi dan telah tersedia aplikasi Whistle Blowing System meskipun secara operasional belum berjalan.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator ini diberikan tanggung jawab kepada beberapa unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan langsung kepada masyarakat sebagai leading sektor pemenuhan indikator tersebut. Unit kerja tersebut diantaranya Dinas Kesehatan dalam hal ini seluruh Puskesmas se-Kabupaten Wajo, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Rumah Sakit Umum Lamaddukkelleng Sengkang dan Rumah Sakit Umum Siwa.

3.2.1.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Dana

Pada bagian ini mengungkapkan efisiensi dari total belanja yang dibebankan kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab langsung terhadap pemenuhan indikator Indeks Reformasi Birokrasi yaitu:

a. Sekretariat Daerah

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2020 sebesar Rp 28.341.352.234,4 dan terealisasi sebesar Rp 23.320.322.212 atau sebesar 82,28% artinya terdapat efisiensi sebesar 27,82%.

b. Inspektorat Daerah

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2020 sebesar Rp 5542062693,74 dan terealisasi sebesar Rp 5303398615 atau sebesar 95,69% artinya terdapat efisiensi sebesar 4,31%.

c. BKPSDM

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2020 sebesar Rp 2.455.625.840 dan terealisasi sebesar Rp 2.287.652.291 atau sebesar 93,15% artinya terdapat efisiensi sebesar 6,85%.

d. Bappelitbangda

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2020 sebesar Rp 4.017.376.640 dan terealisasi sebesar Rp 3.856.598.088 atau sebesar 95,99% artinya terdapat efisiensi sebesar 3,01%.

- e. Diskominfo
- Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2020 sebesar Rp 6.203.795.780 dan terealisasi sebesar Rp 6.063.328.899 atau sebesar 97,74% artinya terdapat efisiensi sebesar 2,26%.
- f. Dinas Kesehatan
- Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2020 sebesar Rp 98.221.600.601 dan terealisasi sebesar Rp 98.221.600.601 atau sebesar 89,00% artinya terdapat efisiensi sebesar 11%.
- g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2020 sebesar Rp 2.256.218.570 dan terealisasi sebesar Rp 2.234.458.718 atau sebesar 99,03% artinya terdapat efisiensi sebesar 0,97%.
- h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2020 sebesar Rp 3.292.383.871 dan terealisasi sebesar Rp 3.183.165.047 atau sebesar 96,68% artinya terdapat efisiensi sebesar 3,32%.
- i. RSUD Lamadukkelleng
- Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2020 sebesar Rp 95.558.953.115,2 dan terealisasi sebesar Rp 92.018.581.418 atau sebesar 96,30% artinya terdapat efisiensi sebesar 3,7%.
- j. RSUD Siwa
- Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2020 sebesar Rp 18.906.040.649 dan terealisasi sebesar Rp 18.495.618.826 atau sebesar 97,83% artinya terdapat efisiensi sebesar 2,17%.

3.2.2 Sasaran 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah

Analisis pencapaian sasaran 2 dapat dijelaskan dengan melihat Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini sebagai berikut :

3.2.2.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Realiasi		
	2020	2018	2019	2020
Nilai SAKIP	B	CC	CC	-
Capaian (%)				-

Indikator Kinerja	Target	Realiasi		
	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	2020	2018	2019
WTP		WTP	WTP	WTP
Capaian (%)				100%

Sumber: Perangkat Daerah yang bersangkutan Tahun 2021

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini yaitu indikator kinerja Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah telah mencapai target adapun untuk indikator kinerja Nilai SAKIP tahun 2020 belum ada data dari pusat.

3.2.2.2 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan/peningkatan pencapaian indikator kinerja Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah difasilitasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang telah melaksanakan beberapa langkah-langkah di antaranya:

- a. Meningkatkan kinerja aparatur pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah
- b. Peningkatan Kompetensi Aparatur Melalui Bimbingan Teknis Sesuai Tupoksi
- c. Mensinkronisasikan Pelaksanaan Program dan Kegiatan dengan Anggaran.
- d. Melakukan harmonisasi /penyesuaian atauran yang mengalami perubahan.

Walaupun telah berhasil meraih WTP namun masih ada beberapa hambatan yang dapat diatasi untuk masa yang akan datang, diantaranya:

- a. Terbatasnya Kemampuan Aparatur
- b. Belum adanya tenaga specific perpajakan yang dimiliki Oleh BPKPD Kab. Wajo
- c. Data Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan yang belum valid
- d. Belum Optimalnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya
- e. Sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan dengan anggaran atau ketersediaan dana perlu ditingkatkan.
- f. Kebijakan daerah maupun pusat sering berubah-ubah.

- g. Berkas kelengkapan untuk penerbitan SP2D yang diajukan oleh SKPD tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat sehingga menimbulkan keterlambatan penerbitan SP2D.
- h. Masih adanya Aset yang dikuasai oleh orang yang tidak berhak dan terbatasnya Aparatur pada bidang pengelolaan Aset.

Adapun indikator kinerja Nilai SAKIP walaupun belum keluar hasil penilaian oleh KemenPANRB, namun Pemerintah kabupaten Wajo optimis dapat mencapai target karena telah didukung dengan adanya:

1. Aspek Perencanaan dan Pengukuran Kinerja

Pada aspek Perencanaan difasilitasi oleh Bappelitbangda dengan telah melaksanakan pemenuhan indikator yaitu dengan menyusun RPJMD Kabupaten Wajo tahun 2019-2024, memfasilitasi penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Perencanaan Kinerja Tahunan (PK). Sedangkan pada aspek pengukuran kinerja, Bappelitbangda telah menyusun IKU Kabupaten Wajo dan memfasilitasi penyusunan IKU Perangkat Daerah Tahun 2020.

2. Aspek Pelaporan dan Capaian Kinerja

Pada Aspek Pelaporan Kinerja difasilitasi oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Wajo dengan telah melaksanakan pemenuhan pelaporan tepat waktu, Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome dan Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan. Sedangkan pada aspek Capaian Kinerja telah melaksanakan penilaian kinerja pada perangkat daerah yang mendukung pencapaian kinerja kabupaten yaitu berupa kinerja yang dilaporkan berupa output dan outcome.

3. Aspek Evaluasi Internal

Pada aspek ini difasilitasi oleh Inspektorat Daerah kabupaten Wajo. Evaluasi internal terhadap SAKIP Perangkat Daerah telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo dalam 2 (dua) tahun terakhir. Di samping itu, kegiatan pengawasan pendukung SAKIP seperti Reviu Renja dan RKA juga telah dilaksanakan. Melalui pengawasan tersebut di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo optimis dapat dapat berkontribusi terhadap nilai komponen Evaluasi Internal dengan bobot nilai 8.

3.2.2.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Dana

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2020 untuk pencapaian sasaran Indeks Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah dan nilai SAKIP Kabupaten Wajo Tahun 2020 dilaksanakan oleh 4 (empat) unit kerja dengan perincian efisiensi penggunaan dana sebagai berikut

1. Indikator Opini BPK

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2020 sebesar Rp 19.677.753.415 dan terealisasi sebesar Rp 19.244.652.279 atau sebesar 97,80% artinya terdapat efisiensi sebesar 2,20%.

2. Indikator Nilai SAKIP:

• Bappelitbangda

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2020 sebesar Rp 4.017.376.640 dan terealisasi sebesar Rp 3.856.598.088 atau sebesar 95,99% artinya terdapat efisiensi sebesar 3,01%.

• Inspektorat

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2020 sebesar Rp 5.542.062.693,74 dan terealisasi sebesar Rp 5.303.398.615 atau sebesar 95,69% artinya terdapat efisiensi sebesar 4,31%.

• Bagian Organisasi

Melalu kegiatan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2020 sebesar Rp 30.747.500 dan terealisasi sebesar Rp 30.236.500 atau sebesar 98,34% artinya terdapat efisiensi sebesar 1,66%.

3.2.3 Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar

Analisis pencapaian sasaran 3 dapat dijelaskan dengan melihat Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini sebagai berikut :

3.2.3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Realiasi		
	2020	2018	2019	2020
Indeks Kepuasan Masyarakat	62	-	-	80,33
Capaian (%)				111,58%

Sumber : Perangkat Daerah yang bersangkutan Tahun 2021

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini yaitu Indeks kepuasan masyarakat telah melampaui target dengan predikat sangat memuaskan. Adapun untuk realisasi terhadap indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2018 dan 2019 tidak dilakukan pendataan.

3.2.3.2 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan/peningkatan pencapaian indikator kepuasan masyarakat didukung dengan adanya akumulasi IKM dari Unit Kerja yang menyelenggarakan pelayanan langsung kepada masyarakat yaitu:

1. IKM Puskesmas (RSUD Lamadukkelleng) dengan rata-rata bernilai 87,72 dengan kategori Baik
 - Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan Kesehatan
 - Kompetensi pegawai yang secara terus menerus ditingkatkan
 - Adanya Teknologi informasi dalam menunjang setiap aktivitas kinerja RSUD
2. IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu 76,50 atau dengan kategori Kurang Baik
3. IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu 77,98 dengan kategori Baik.
4. IKM RSUD Lamadukkelleng Sengkang yaitu 78,47 atau dengan kategori Baik
5. IKM RSUD Siwa yaitu 81,02 dengan kategori Baik

3.2.3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Dana

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2020 untuk pencapaian sasaran Indeks kepuasan masyarakat berdasarkan realisasi anggaran unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan langsung kepada masyarakat, yaitu:

3. Dinas Kesehatan

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2020 sebesar Rp 98.221.600.601 dan terealisasi sebesar Rp 98.221.600.601 atau sebesar 89,00% artinya terdapat efisiensi sebesar 11%.

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2020 sebesar Rp 2.256.218.570 dan terealisasi sebesar Rp 2.234.458.718 atau sebesar 99,03% artinya terdapat efisiensi sebesar 0,97%.

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2020 sebesar Rp 3.292.383.871 dan terealisasi sebesar Rp 3.183.165.047 atau sebesar 96,68% artinya terdapat efisiensi sebesar 3,32%.

6. RSUD Lamaddukkelleng
 Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2020 sebesar Rp 95.558.953.115,2 dan terealisasi sebesar Rp 92.018.581.418 atau sebesar 96,30% artinya terdapat efisiensi sebesar 3,7%.

7. RSUD Siwa
 Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2020 sebesar Rp 18.906.040.649 dan terealisasi sebesar Rp 18.495.618.826 atau sebesar 97,83% artinya terdapat efisiensi sebesar 2,17%.

3.2.4 Sasaran 4 Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia

Analisis pencapaian sasaran 4 dapat dijelaskan dengan melihat Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini sebagai berikut :

3.2.4.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Realiasi		
		2018	2019	2020
Indeks Pembangunan Manusia	2020	68,57	69,05	69,15
	69,98	68,57	69,05	69,15
Capaian (%)				98,81 %

Sumber: BPS Tahun 2020

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini yaitu Indeks pembangunan manusia kurang mencapai target dengan kategori capaian memuaskan.

3.2.4.2 Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Kegagalan pencapaian indikator Indeks Pembangunan Manusia disebabkan dengan adanya:

1. Angka Harapan Hidup dengan hasil 67,35 tahun;

2. Harapan Lama Sekolah dengan hasil 13,14 tahun;
3. Rata-rata Lama Sekolah dengan hasil 6,81 tahun;
4. Pengeluaran Perkapita disesuaikan dengan hasil Rp 12.386.000,00.

3.2.4.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Dana

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2020 untuk pencapaian sasaran Indeks Pembangunan Manusia dibebankan kepada 3 (tiga) perangkat daerah yaitu:

1. Dinas Kesehatan

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2020 sebesar Rp 98.221.600.601 dan terealisasi sebesar Rp 98.221.600.601 atau sebesar 89,00% artinya terdapat efisiensi sebesar 11%.

2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2020 sebesar Rp 112.772.991.785 dan terealisasi sebesar Rp 122.601.528.333 atau sebesar 108,72% artinya terdapat disefisiensi sebesar 8,72%.

3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2020 sebesar Rp 2.638.776.973 dan terealisasi sebesar Rp 2.602.813.591 atau sebesar 98,64% artinya terdapat efisiensi sebesar 1,56%.

3.2.5 Sasaran 5 Meningkatnya Derajat Pendidikan dan Literasi Masyarakat

Analisis pencapaian sasaran 5 dapat dijelaskan dengan melihat Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini sebagai berikut :

3.2.5.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Realiasi		
	2020	2018	2019	2020
Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,55	6,78	6,79	6,81
Capaian (%)				90,2 %

Sumber: BPS Tahun 2020

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini yaitu Angka Rata-rata Lama Sekolah kurang mencapai target dengan predikat capaian memuaskan.

3.2.5.2 Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Kegagalan pencapaian indikator angka rata-rata lama sekolah didukung dengan adanya:

1. Secara umum Pandemi Covid berpengaruh terhadap dunia pendidikan;
2. Refocusing anggaran atas program dan kegiatan.
3. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas implementasi program dan kegiatan terus diperkuat.
4. Kesalahan dalam penentuan target

3.2.5.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Dana

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah satu-satunya perangkat daerah yang dibebankan target angka rata-rata lama sekolah. Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2020 untuk pencapaian sasaran Indeks Reformasi Birokrasi adalah sebesar Rp. 112.772.991.785 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 122.601.528.333 atau 108.72%. Besarnya realisasi dari pada jumlah anggaran yang tersedia menandakan adanya disefisiensi penggunaan dana.

3.2.6 Sasaran 6 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Analisis Pencapaian Sasaran 6 dapat Dijelaskan dengan melihat Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini sebagai berikut :

3.2.6.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Realiasi		
	2020	2018	2019	2020
Angka Harapan Hidup	69,06	66,79	67,17	67,35
Capaian (%)				97,52%

Sumber: BPS Tahun 2020

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini yaitu Angka Harapan Hidup kurang mencapai target dengan predikat memuaskan.

3.2.6.2 Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Kegagalan pencapaian indikator Angka Harapan Hidup didukung dengan adanya :

1. Pandemi Covid-19;
2. Kesalahan dalam penentuan target meningkat 3 (tiga) tahun terakhir angka menunjukkan selalu dibawah 67 (enam puluh tujuh) tahun.

3.2.6.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Dana

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2020 untuk pencapaian sasaran Angka Harapan Hidup adalah sebesar melalui 3 (tiga) unit kerja yaitu:

1. Dinas Kesehatan

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2020 sebesar Rp 98.221.600.601 dan terealisasi sebesar Rp 98.221.600.601 atau sebesar 89,00% artinya terdapat efisiensi sebesar 11%.

2. RSUD Lamadukkelleng

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2020 sebesar Rp 95.558.953.115,2 dan terealisasi sebesar Rp 92.018.581.418 atau sebesar 96,30% artinya terdapat efisiensi sebesar 3,7%.

3. RSUD Siwa

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2020 sebesar Rp 18.906.040.649 dan terealisasi sebesar Rp 18.495.618.826 atau sebesar 97,83% artinya terdapat efisiensi sebesar 2,17%.

3.2.7 Sasaran 7 Terpeliharanya Kehidupan Religius Masyarakat.

Analisis Pencapaian Sasaran 7 dapat Dijelaskan dengan melihat Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini sebagai berikut :

3.2.7.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Realiasi		
	2020	2018	2019	2020
Persentase Mesjid dan rumah ibadah lainnya dalam kualitas baik	66,67	-	-	78,14
Capaian (%)				117,2%

Sumber: Setda Tahun 2021

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini yaitu Persentase mesjid dan rumah ibadah lainnya dalam kualitas baik mencapai target dengan predikat sangat memuaskan. Adapun pada tahun 2018 dan 2019 tidak dilakukan pendataan.

3.2.7.2 Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan/peningkatan pencapaian indikator Persentase Mesjid dan rumah ibadah lainnya dalam kualitas baik didukung dengan adanya :

1. Komitmen pimpinan melalui penyediaan anggaran untuk bantuan dan hibah masjid;
2. Kesadaran masyarakat yang cukup tinggi;

3.2.7.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Dana

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2020 untuk pencapaian Persentase Mesjid dan rumah ibadah lainnya dalam kualitas baik adalah sebesar Rp. 107.971.600,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.84.370.600,00 atau sebesar 78,14%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar 21,86%.

3.2.8 Sasaran 8 Meningkatnya Partisipasi Dan Keberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan.

Analisis Pencapaian Sasaran 8 dapat dijelaskan dengan melihat Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini sebagai berikut :

3.2.8.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Realiasi		
Indeks Pembangunan Gender(IPG)	2020	2018	2019	2020
	90,26	98,79	97,87	90
Capaian (%)				99,71%
Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	2020	2018	2019	2020
	61,25	99,38	96,50	61
Capaian (%)				99,59%

Sumber: Perangkat Daerah yang bersangkutan

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini yaitu Indeks Pembangunan Gender(IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) kurang mencapai target dengan predikat masing-masing memuaskan.

3.2.8.2 Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Kegagalan pencapaian indikator Indeks Pembangunan Gender(IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender(IDG) Meski telah melakukan berbagai advokasi, pelatihan bagi fasilitator, dan sosialisasi kepada berbagai pihak, namun sejumlah kendala yang masih dihadapi dalam upaya percepatan PUG, yakni keterbatasan sumber daya manusia yang memahami PUG dan implementasinya, keterbatasan anggaran, serta perubahan nomenklatur kelembagaan yang menyebabkan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bentuknya tidak sama.

Solusinya adalah lebih meningkatkan kerja sama dan dukungan semua pihak dalam pemerintahan daerah sehingga akan

mempercepat pembangunan berbasis gender dan menjalin sinergitas dengan seluruh perangkat daerah, sumber daya manusia lebih ditingkatkan dengan melakukan berbagai pelatihan/sosialisasi responsive gender dan yang lebih utama adalah perhatian dalam bidang penganggaran demi terlaksananya kegiatan sesuai yang diharapkan.

3.2.8.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Dana

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan satu-satunya perangkat daerah yang dibebankan target pada sasaran ini. Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2020 untuk pencapaian sasaran Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah sebesar Rp. 7.314.303.267,46 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 6.413.190.260 atau 87,68% dengan tingkat efisiensi sebesar 12,32%.

3.2.9 Sasaran 9 Meningkatkan Daya Saing Infrastruktur Daerah

Analisis Pencapaian Sasaran 9 dapat Dijelaskan dengan melihat Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini sebagai berikut :

3.2.9.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Realiasi		
	2020	2018	2019	2020
Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	25	-	-	0,92
Capaian (%)				3,68%

Sumber : Laporan Analisa Daya Saing Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini yaitu Indeks Daya Saing Infrastruktur telah mencapai target dengan Predikat Kurang Memuaskan.

3.2.9.2 Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan pencapaian indikator Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah didukung dengan adanya :

1. Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap sebesar 45,18%;
2. Persentase pendudukan berakses air minum sebesar 87,09%;
3. Persentase rumah tinggal berakses sanitasi sebesar 93,89%

Namun demikian, pencapaian ini masih belum memenuhi aspek rumah tangga berakses listrik karena ketiadaan data yang valid sehingga perlu diadakan perbaikan penentuan target.

3.2.9.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Dana

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unit kerja yang dibebankan target pada sasaran ini. Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2020 untuk pencapaian sasaran Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah adalah masing-masing sebesar:

1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2020 sebesar Rp 172.223.860.688 dan terealisasi sebesar Rp 170.201.717.138 atau sebesar 98,83% artinya terdapat efisiensi sebesar 1,17%.
2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2020 sebesar Rp 7.512.619.056 dan terealisasi sebesar Rp 7.061.225.029 atau sebesar 93,99% artinya terdapat efisiensi sebesar 6,01%.

3.2.10 Sasaran 10 Meningkatnya Konektivitas Wilayah

Analisis Pencapaian Sasaran 10 dapat Dijelaskan dengan melihat Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini sebagai berikut :

3.2.10.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Realiasi		
	2020	2018	2019	2020
Persentase jalan yang menjangkau desa dengan baik sepanjang tahun	31	-	34,42	45,18
Capaian (%)				145,74%

Sumber : Perangkat Daerah yang bersangkutan Tahun 2021

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini yaitu Persentase jalan yang menjangkau desa dengan baik sepanjang tahun mencapai target dengan predikat Sangat Memuaskan.

3.2.10.2 Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan/peningkatan pencapaian indikator Persentase jalan yang menjangkau desa dengan baik sepanjang tahun didukung dengan adanya manajemen ASN Pemerintah Kabupaten Wajo yang telah berbasis teknologi informasi telah mendorong ASN lingkup Dinas PUPRP Kabupaten Wajo untuk tetap mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

3.2.10.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Dana

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2020 untuk pencapaian sasaran Persentase jalan yang menjangkau desa dengan baik sepanjang tahun. Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2020 sebesar Rp 172.223.860.688 dan terealisasi sebesar Rp 170.201.717.138 atau sebesar 98,83% artinya terdapat efisiensi sebesar 1,17%.

3.2.11 Sasaran 11 Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Analisis Pencapaian Sasaran 11 dapat Dijelaskan dengan melihat Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini sebagai berikut :

3.2.11.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

IndikatorKinerja	Target	Realiasi		
	2020	2018	2019	2020
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.	61,03	90,50	100,82	60,93
	Capaian (%)			

Sumber: DLH Tahun 2021

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah kurang mencapai target dengan predikat memuaskan.

3.2.11.2 Analisis penyebab kegagalan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kegagalan pencapaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Indeks Pencemaran Kualitas Air sebesar 60 atau predikat Cukup;
2. Indeks Kualitas Udara sebesar 90,73
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 129,2 Km².

3.2.11.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Dana

Dinas Lingkungan Hidup merupakan satu-satunya perangkat daerah yang dibebankan target untuk sasaran ini. Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2020 untuk pencapaian sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp.3.790.442.625,79 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.3.790.442.635,79 atau 98,74%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar 1,26 %.

3.2.12 Sasaran 12 Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Analisis Pencapaian Sasaran 12 dapat dijelaskan dengan melihat Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini sebagai berikut :

3.2.12.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

IndikatorKinerja	Target	Realiasi		
	2020	2018	2019	2020
Persentase Pertumbuhan Ekonomi	6,66	1,08	4,06	-1,17
	Capaian (%)			
PDRB / Kapita (Juta)	2020	2018	2019	2020
	51,57	47,15	49,87	48,59
Capaian (%)				94,22%
Indeks Gini Ratio	2020	2018	2019	2020
	0,345	0,369	0,347	0,355
Capaian (%)				102,90%

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini yaitu Persentase Pertumbuhan Ekonomi tidak mencapai target dengan predikat kurang memuaskan, PDRB / Kapita (Juta) tidak mencapai target dengan predikat memuaskan, Indeks Gini Ratio tidak mencapai target kurang memuaskan.

3.2.12.2 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Kegagalan pencapaian indikator Persentase Pertumbuhan Ekonomi didukung dengan adanya:

1. Tidak adanya pertumbuhan Kawasan Industri
2. Realisasi Investasi sebesar Rp 11.940.837.780
3. Peningkatan Angkatan kerja yang bekerja
4. Belum optimalnya *Human Capital Investment*

Keberhasilan/peningkatan pencapaian indikator Persentase PDRB / Perkapita (Juta) didukung dengan adanya distribusi dari sektor:

1. Pertanian sebesar 33,76%

2. Pertambangan dan penggalian sebesar 12,56%
3. Industri Pengolahan sebesar 4,02%
4. Perdagangan sebesar 16,53%
5. Jasa-jasa sebesar 19,61%
6. Konstruksi sebesar 10,22%
7. Transportasi, Informasi dan komunikasi sebesar 3,30%

Keberhasilan/peningkatan pencapaian indikator Indeks Gini Ratio didukung dengan adanya:

1. Menurunkan angka stunting;
2. Menurunkan kemiskinan;
3. Meningkatkan peluang pekerjaan;
4. Menurunkan ketimpangan kekayaan;
5. Memperkuat industri berbasis rakyat

3.2.12.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Dana

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2020 untuk pencapaian sasaran Persentase Pertumbuhan Ekonomi, PDRB / Kapita (Gaji) dan Indeks Gini Ratio adalah :

1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2020 sebesar Rp 2.638.776.973 dan terealisasi sebesar Rp 2.602.813.591 atau sebesar 98,64% artinya terdapat efisiensi sebesar 1,56%.
2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2020 sebesar Rp 2.638.776.973 dan terealisasi sebesar Rp 2.602.813.591 atau sebesar 98,64% artinya terdapat efisiensi sebesar 1,56%.
3. Dinas Lingkungan Hidup;
Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) sebesar Rp.3.790.442.625,79 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.3.790.442.635,79 atau 98,74%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar 1,26 %.
4. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2020 sebesar Rp 6.203.795.780 dan terealisasi sebesar Rp 6.063.328.899 atau

sebesar 97,74% artinya terdapat efisiensi sebesar 2,26%.

5. Dinas Perhubungan;

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2020 sebesar Rp 949430504,88 dan terealisasi sebesar Rp 931213931 atau sebesar 98,08% artinya terdapat disefisiensi sebesar 1,92%.

6. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2020 sebesar Rp 4082282000,1 dan terealisasi sebesar Rp 4078685316 atau sebesar 99,91% artinya terdapat disefisiensi sebesar 0,09%.

7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2020 sebesar Rp 112.772.991.785 dan terealisasi sebesar Rp 122.601.528.333 atau sebesar 108.72% artinya terdapat disefisiensi sebesar 8,72%.

8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2020 sebesar Rp 3.292.383.871 dan terealisasi sebesar Rp 3.183.165.047 atau sebesar 96,68% artinya terdapat efisiensi sebesar 3,32%.

3.2.13 Sasaran 13 Meningkatnya Produktivitas Sektor Ekonomi Unggulan

Analisis Pencapaian Sasaran 13 dapat Dijelaskan dengan melihat Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini sebagai berikut :

3.2.13.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

IndikatorKinerja	Target	Realiasi		
	2020	2018	2019	2020
Persentase kontribusi sektor pertanian, kehutanan & Perikanan dalam PDRB	37,06	34,67	32,60	33,76
	Capaian (%)			

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini yaitu Kontribusi sektor pertanian, kehutanan & Perikanan dalam PDRB dengan predikat Memuaskan

3.2.13.2 Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan/peningkatan pencapaian indikator Kontribusi sektor pertanian, kehutanan & Perikanan dalam PDRB (%) didukung dengan adanya:

1. Adanya program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, baik itu program Kabupaten, Provinsi maupun Pusat/Kementerian;
2. Animo pelaku usaha pertanian, kehutanan dan perikanan tidak terlanjur terpengaruh terhadap Pandemic Covid 19;
3. Iklim/cuaca sangat mendukung dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan;
4. Pasaran domestik masih sangat terbuka untuk produk pertanian, kehutanan dan perikanan.

3.2.13.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Dana

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2020 untuk pencapaian sasaran Kontribusi sector pertanian, kehutanan & Perikanan dalam PDRB (%) adalah :

1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2020 sebesar Rp 14283409094 dan terealisasi sebesar Rp 11846574810 atau sebesar 82,94% artinya terdapat efisiensi sebesar 17,06%.
2. Dinas Perikanan
Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2020 sebesar Rp 2963596595 dan terealisasi sebesar Rp 2845566004 atau sebesar 96,02% artinya terdapat efisiensi sebesar 3,98%.

3.2.14 Sasaran 14 Meningkatkan Kualitas Hidup Lapisan Masyarakat Miskin.

Analisis Pencapaian Sasaran 14 dapat Dijelaskan dengan melihat Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini sebagai berikut :

3.2.14.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Realiasi		
	2020	2018	2019	2020
Persentase Penduduk Miskin	6,68	7,50	6,91	6,95
Capaian (%)				104,04%

Sumber : BPS Tahun 2020

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini yaitu Persentase Penduduk miskin melebihi target minimal dengan Predikat Kurang memuaskan.

3.2.14.2 Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Kendala/hambatan dalam pencapaian indikator Persentase Penduduk Miskin dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya:

1. Adanya pandemi Covid-19;
2. Masih tingginya garis kemiskinan yang ditandai dengan Rp/kapita/bulan sebesar Rp 350.775,00
3. Kurangnya anggaran sehingga bantuan sosial kepada masyarakat belum merata;
4. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 0,98;
5. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,21
6. Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan, terbatasnya kemampuan diversifikasi usaha, respom terbiasa dalam kondisi sebelumnya dan tidak berani berspekulasi untuk membuka yang baru.

3.2.14.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Dana

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan perangkat daerah yang dibebankan target pada sasaran ini. Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2020 untuk pencapaian sasaran Persentase Penduduk Miskin adalah sebesar Rp.1.421.287.267,46 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp1.242.190.920 atau 87,40%, sedangkan anggaran belanja untuk APBN sebesar 5.893.016.000 dengan realisasi

sebesar Rp.5.170.999.340 atau 87,75%.

3.2.15 Sasaran 15: Berkembangnya lapangan kerja dan lapangan usaha.

Analisis Pencapaian Sasaran 15 dapat dijelaskan dengan melihat Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini sebagai berikut :

3.2.15.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

IndikatorKinerja	Target	Realiasi		
	2020	2018	2019	2020
Tingkat pengangguran terbuka.	3,54	3,79	3,30	4,33
Capaian (%)				122,31%

Sumber: BPS Tahun 2020

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini yaitu Tingkat pengangguran terbuka melebihi target minimal dengan predikat Kurang Memuaskan.

3.2.15.2 Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan/peningkatan pencapaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka didukung dengan adanya:

1. Adanya pandemi Covid-19;
2. Terbatasnya lapangan kerja;
3. Kurangnya bantuan modal untuk membangun kembali usaha yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.

3.2.15.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Dana

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi merupakan perangkat daerah yang dibebankan target pada saasaran ini. Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2020 dengan Jumlah anggaran (APBD-Perubahan) 2020 sebesar Rp 4082282000,1 dan terealisasi sebesar Rp 4078685316 atau sebesar 99,91% artinya terdapat disefisiensi sebesar 0,09%.

3.3 Realisasi Anggaran

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2020 yang dibiayai dengan anggaran yang tertuang dalam APBD Tahun 2020, APBD Kabupaten Wajo Tahun 2020, secara garis besar terdiri dari tiga bagian yaitu, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Garis besar APBD Tahun 2019 dan realisasinya berdasarkan data, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN WAJO					
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH					
TAHUN ANGGARAN 2020					
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	1.448.219.136.312,03	1.380.908.925.376,14	(67.310.210.935,89)	95,35
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	143.830.650.161,00	130.107.301.455,99	(13.723.348.705,01)	90,46
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	32.979.786.270,00	37.556.156.874,00	4.576.370.604,00	113,88
1.1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	11.909.407.100,00	9.664.918.979,80	(2.244.488.120,20)	81,15
1.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.250.880.008,00	15.250.880.008,00	0,00	100,00
1.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	83.690.576.783,00	67.635.345.594,19	(16.055.231.188,81)	80,82
1.2	DANA PERIMBANGAN	992.450.403.806,00	986.696.908.817,00	(5.753.494.989,00)	99,42
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	42.286.548.000,00	40.540.059.096,00	(1.746.488.904,00)	95,87
1.2.2	Dana Alokasi Umum	681.631.121.000,00	676.935.175.000,00	(4.695.946.000,00)	99,31
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	268.532.734.806,00	269.221.674.721,00	688.939.915,00	100,26
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	311.938.082.345,03	264.104.715.103,15	(47.833.367.241,88)	84,67
1.3.1	Pendapatan Hibah	50.436.476.008,00	18.168.306.805,00	(32.268.169.203,00)	36,02
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	68.824.018.337,03	64.571.486.298,15	(4.252.532.038,88)	79,29
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	155.229.588.000,00	155.229.588.000,00	0,00	100,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	37.448.000.000,00	36.135.334.000,00	(1.312.666.000,00)	96,49
2	BELANJA	1.467.290.469.753,89	1.355.678.859.162,80	(111.611.610.591,09)	92,39
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	837.092.273.036,96	805.737.348.168,00	(31.354.924.868,96)	96,25
2.1.1	Belanja Pegawai	601.858.845.292,31	575.880.676.709,00	(25.978.168.583,31)	95,68
2.1.4	Belanja Hibah	14.828.332.380,00	13.202.300.000,00	(1.626.032.380,00)	89,03
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.420.000.000,00	2.419.492.800,00	(507.200,00)	99,98
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	5.384.903.108,10	5.217.519.054,00	(167.384.054,10)	96,89
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	192.753.862.996,00	192.743.061.796,00	(10.801.200,00)	99,99
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	19.846.329.260,55	16.274.297.809,00	(3.572.031.451,55)	82,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	630.198.196.716,93	549.941.510.994,80	(80.256.685.722,13)	87,26
2.2.1	Belanja Pegawai	51.025.892.200,00	42.363.031.026,00	(8.662.861.174,00)	83,02
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	284.705.691.083,83	232.190.060.911,05	(52.515.630.172,78)	81,55
2.2.3	Belanja Modal	294.466.613.433,10	275.388.419.057,75	(19.078.194.375,35)	93,52

LAMPIRAN I PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 1

1	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(19.071.333.441,86)	25.230.066.213,34	44.301.399.655,20	(132,29)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	25.571.333.441,86	25.571.333.441,86	0,00	100,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	25.571.333.441,86	25.571.333.441,86	0,00	100,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00	100,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(19.071.333.441,86)	(19.071.333.441,86)	0,00	100,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKEANAAN	0,00	44.301.399.655,20	44.301.399.655,20	0,00

Sumber : BPKPD 2020

3.3.1 Pendapatan

Realisasi pendapatan untuk Tahun Anggaran 2020 telah memenuhi target yang direncanakan dalam APBD Kabupaten Wajo yakni dari target sebesar Rp.1.448.219.136.312,03 dan terealisasi sebesar Rp1.380.908.925.376,14 atau **95,35%**.

3.3.2 Belanja Tidak Langsung

Realisasi untuk Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2020 telah memenuhi target seperti yang telah direncanakan dalam APBD Kabupaten Wajo sebesar Rp. 837.092.273.036,96 dan Terealisasi sebesar Rp. 805.737.348.168,00 atau **96,25%**.

3.3.3 Belanja Langsung

Realisasi untuk Belanja Langsung Tahun Anggaran 2020 sudah cukup memenuhi target seperti yang telah direncanakan dalam APBD Kabupaten Wajo sebesar Rp. 630.198.196.716,93 dan Terealisasi sebesar Rp. 549.941.510.994,80 atau **87,26%**.

3.3.4 Pembiayaan Daerah

Realisasi Anggaran untuk Pembiayaan daerah terbagi atas dua yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah telah memenuhi target yang telah direncanakan dalam APBD Kabupaten Wajo sebesar :

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah senilai Rp. 25.571.333.441,86 dan Terealisasi sebanyak Rp. 25.571.333.441,86 atau **100%**.
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah senilai Rp. 6.500.000.000,00 dan Terealisasi sebanyak Rp. 6.500.000.000,00 atau **100%**.

Untuk mengoptimalkan capaian kinerja keuangan untuk tahun selanjutnya maka Pemerintah Kabupaten Wajo melakukan kebijakan sebagai berikut:

1. Sinkronisasi antara perencanaan dan keuangan sehingga dokumen perencanaan betul-betul dapat dipedomani untuk penentuan anggaran.
2. Mengupayakan program dan kegiatan pada Perangkat Daerah agar direncanakan sesuai dengan indikator kinerja yang dapat diukur.
3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wajo tepat waktu.
4. Melakukan koordinasi yang intensif kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait dengan penerimaan daerah.
5. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan waktu yang dibutuhkan.

3.3.5 Penghargaan

Sepanjang tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Wajo berhasil mendapatkan penghargaan pada tingkat provinsi dan nasional, diantaranya:

1. Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Berkelanjutan Sebagai Kabupaten Stop BABS/ODF dari Menteri Kesehatan
2. Penghargaan Kepala Desa/Lurah Terbaik Kabupaten/Kota SBS/ODF dari Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan
3. Penghargaan Natural Leader Terbaik Kabupaten/Kota SBS/ODF dari Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan
4. Penghargaan Sanitarian/Petugas Kesehatan Lingkungan Puskesmas Terbaik Kabupaten/Kota SBS/ODF dari Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan
5. Penghargaan Penerapan Sistem Merit di Instansi Pemerintah dari Komisi Aparatur Sipil Negara
6. Penghargaan atas Inovasi Dalam Pelayanan Terpadu Penyelesaian Penetapan Pertimbangan Teknis Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019 dari Badan Kepegawaian Negara Regional IV
7. Penghargaan atas Progres Tercepat Pelaksanaan DAK BSPS Tahun 2020 oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8. Penghargaan atas Keberhasilannya Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2019 dengan Capaian Opini WTP dari Kementerian Keuangan
9. Penghargaan atas Seluruh Desa Taat Pajak Tahun 2019 oleh KPKN Watampone
10. Penghargaan atas Pemda Tercepat Dalam Penyaluran DAK Fisik Tahun 2019 dari KPKN Watampone
11. Penghargaan atas Proklamasi Tahun 2020 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12. Penghargaan atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Level 3 dari BPKP
13. Penghargaan atas Kapabilitas APIP Level 3 dari BPKP
14. Penghargaan atas Inovasi Program Menegakkan Kejayaan Benang Sutura di Tanah Wajo dari TVRI Sulawesi Selatan
15. Penghargaan dan Brivet atas Kontribusi Membantu Kinerja Kepolisian dari Kapolda Sulawesi Selatan
16. Penghargaan atas partisipasi dalam kegiatan pelayanan KB serentak sejuta akseptor dari Kepala BKKBN
17. Penghargaan terbaik sebagai DPMPTSP dari BPJS Ketenagakerjaan
18. Penghargaan Fajar Award dari Dirut Harian Fajar

BAB IV PENUTUP

Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran yang telah dilakukan dari berbagai kegiatan, yang membandingkan antara rencana, pencapaian kegiatan dengan realisasi sasaran, berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat skala nilai kinerja tinggi berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan pada Instansi Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2020 dan berdasarkan realisasi anggaran, penggunaan anggaran dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun 2020 adalah sebanyak Rp.1.448.219.136.312,03 dan terealisasi sebesar Rp1.380.908.925.376,14 atau 95,35%. secara efektif telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Kabupaten Wajo.

Berdasarkan pagu indikatif Renstra jumlah anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Instansi Pemerintah Kabupaten Wajo adalah 95,35 % dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Instansi Pemerintah Kabupaten Wajo telah dioptimal dan lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Wajo.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Wajo ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Wajo kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Wajo.

Sengkang, 12 Maret 2021


BUPATI WAJO,

Dr. H. AMRAN MAHMUD, S.Sos., M.Si.